



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2803 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN LANTAI 4 SAMPAI DENGAN LANTAI 8 SERTA BASEMENT 1 DAN 2, GEDUNG PRASADA SASANA KARYA, JALAN SURYO PRANOTO NOMOR 8, KELURAHAN PETOJO UTARA, KECAMATAN GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA KEPADA PT BANK DKI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai surat PT Bank DKI tanggal 3 Februari 2016 Nomor 02/DIR/GGA/II/2016 PT Bank DKI mengajukan permohonan untuk menggunakan bangunan milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk kantor operasional di lantai 4 sampai dengan lantai 8 dan basement 1 dan 2, Gedung Prasada Sasana Karya, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9, Kota Administrasi Jalan Suryo Pranoto Nomor 8, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas Nomor 5376/-076.3 tanggal 24 November 2016, permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah dimaksud dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Lantai 4 Sampai Dengan Lantai 8 Serta Basement 1 dan 2, Gedung Prasada Sasana Karya, Jalan Suryo Pranoto Nomor 8, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat Kepada PT Bank DKI;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN LANTAI 4 SAMPAI DENGAN LANTAI 8 SERTA BASEMENT 1 DAN 2, GEDUNG PRASADA SASANA KARYA, JALAN SURYO PRANOTO NOMOR 8, KELURAHAN PETOJO UTARA, KECAMATAN GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT KEPADA PT BANK DKI.**

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa bangunan Lantai 4 sampai dengan Lantai 8 serta basement 1 dan 2, Gedung Prasada Sasana Karya, Jalan Suryo Pranoto Nomor 8, Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat kepada PT Bank DKI.

KEDUA : Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut :

Bangunan

Luas bangunan keseluruhan : \pm 10.704 m² (lebih kurang seribu tujuh ratus empat meter persegi)

Luas bangunan yang disewa : \pm 7.806 m² (lebih kurang tujuh ribu delapan ratus enam meter persegi)

Nomor Barang : 11.09.1.13.01.02.00.00.000.1995
03.11.01.01.001.00001

- KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - besarnya uang sewa yang harus dibayarkan oleh PT Bank DKI sebesar Rp2.934.806.000,00 (dua miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu rupiah) per tahun dan uang sewa tersebut akan dibayarkan sekaligus 5 tahun di muka sebesar Rp14.674.030.000,00 (empat belas miliar enam ratus tujuh puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah);
 - uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b, disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah (KPKD) Kota Administrasi Jakarta Pusat kode rekening 4.1.4.03.02 (sewa bangunan) yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum Perjanjian Sewa Menyewa ditandatangani;
 - hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa Menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pemanfaatan bangunan dimaksud hanya untuk kantor operasional PT Bank DKI; dan
 - penyewaan sebagian Bangunan dimaksud tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk apapun.
- KEEMPAT : Pelaksanaan pemanfaatannya harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan lingkungan sekitarnya dan biaya yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Bank DKI.
- KELIMA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Bank DKI paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan Gubernur ini.
- KEENAM : Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Bank DKI.

KETUJUH : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan bangunan oleh PT Bank DKI.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Plt. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Jakarta Pusat
6. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Direktur Utama PT Bank DKI